



News Title : Pemerintah Pertimbangkan Insentif	
Media Name : Kompas	Journalist : AGP
Publish Date : 21 August 2023	Tonality : Positive
News Page : 13	News Value : 328,950,000
Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Gabriel Rey (CEO Triv), Yudhono Rawis (CEO Tokocrypto)	Ads Value : 109,650,000
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Bursa Kripto

BURSA KRIPTO

Pemerintah Pertimbangkan Insentif

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti akan mempertimbangkan pemberian insentif pajak perdagangan aset kripto setelah bursa beroperasi. Pengenaan pajak serta biaya operasional dikawatirkan membuat investor tak tertarik bertransaksi di bursa domestik.

Bursa kripto dikelola oleh tiga lembaga, yakni PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) selaku penyelenggara bursa, PT Tennet Depository Indonesia selaku pengelola tempat penyimpanan, dan PT Kliring Berjangka Indonesia selaku lembaga penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Konsekuensinya, transaksi melalui bursa akan dikenai biaya tambahan.

Biaya tambahan tersebut kini masih dalam proses negosiasi antara pihak bursa dan para pedagang aset kripto. Sementara ini bursa menetapkan biaya tambahan sebesar 0,02 persen.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Minggu (20/8/2023), mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan insentif pajak terhadap aset kripto. Hal ini mengingat sejumlah pedagang merasa biaya tambahan dan pajak yang dibebankan terlalu besar. "Untuk insentif, terbuka kemungkinan diberikan. Tentu perlu ada kajian terlebih dulu," kata Didid.

Sebelumnya, Bappebti menyebutkan bursa kripto akan mulai beroperasi begitu 30 calon pedagang fisik aset kripto

(CPFAK) mendaftarkan ulang ke Bappebti paling lambat 17 Agustus 2023. Sejauh ini terdapat 27 dari total 30 CPFAK yang telah mendaftarkan diri. "Tampaknya (bursa kripto) belum bisa efektif (beroperasi). Sebab, setelah proses daftar ulang, bursa akan mengecek sistem para pedagang untuk memastikan terkoneksi. Harapannya 1 September bisa efektif," ujarnya.

Kurang menarik

Menurut Gabriel Rey, CEO Triv, salah satu CPFAK, persmian bursa kripto menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekosistem aset kripto Tanah Air. Hal ini terutama mengenai pemberian jaminan keamanan terhadap investor dalam bertransaksi. Namun, biaya tambahan yang dibebankan oleh bursa membuat investor justru kurang tertarik untuk bertransaksi melalui bursa.

"Setidaknya diberi insentif pajak agar para investor tertarik untuk masuk bursa kripto di Indonesia. Apalagi, ini adalah bursa kripto pertama di dunia," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, subyek pajak yang dikenai PPh adalah penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, serta penambang aset kripto. Sementara itu, subyek yang dikenai PPN ialah penjual dan pembeli.

Setiap transaksi aset kripto melalui bursa akan dikenai pajak 0,21 persen yang terdiri atas PPN 0,11 persen dan PPh 0,1 persen. Rey menjelaskan, pungutan itu belum termasuk biaya tambahan lebih kurang 0,02 persen hingga 0,04 persen dan biaya penukaran (*fee exchange*) sebesar 0,1 persen.

"Jadi, total pungutannya sekitar 0,35 persen. Tentu ini akan membebani investor karena tugas para pedagang hanya memungut. Jika benar berlaku demikian, (situasi itu) berpotensi membuat investor bertransaksi di platform luar negeri karena lebih murah," tutur Rey.

Sejak pajak atas aset kripto dikenakan per Maret 2022, perolehan pajak aset kripto per Desember 2022 mencapai Rp 246,45 miliar. Namun, dalam tiga tahun terakhir, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami tren penurunan. Berdasarkan data Bappebti, total nilai transaksi kripto pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun dan merosot jadi Rp 306,4 triliun pada 2022.

Pada periode Januari-Juni 2023, nilai transaksi aset kripto tercatat Rp 66,44 triliun atau turun 68,65 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hingga Juni 2023, jumlah pelanggan aset kripto yang terdaftar sebanyak 17,54 juta orang.

Senada dengan Rey, CEO Tokocrypto Yudhono Rawis berpendapat, bursa kripto diharapkan menciptakan likuiditas dan mendukung inovasi produk yang memajukan pasar kripto Indonesia. (AGP)